KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Langkah DPR menuju parlemen modern
Tanggal : Senin, 18 Maret 2019
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

ADVERTORIAL

Langkah DPR Menuju Parlemen Modern

Dalam studi yang dilakukan Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit (GIZ), lembaga swadaya dari Jerman, Parlemen Indonesia menempati urutan pertama kategori parlemen paling transparan di antara parlemen negara kawasan. Kendati begitu, DPR masih perlu berinovasi, tidak hanya dalam kerja-kerja legislasi tapi juga bagaimana berinteraksi dengan publik.

"Kita tentu bangga jika DPR dinilai paling terbuka karena itu artinya salah satu indikator membaiknya demokrasi Indonesia, Alhamdulillah," ujar Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi dan Modernisasi DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Bernardo R. Agawin selaku Koordinator GIZ itu.

Menurut Fahri, DPR adalah perlambang lahirnya daulat rakyat dan demokrasi. Karenanya tidak punya pilihan, penguatan DPR untuk menuju ke arah Parlemen Modern adalah keharusan. Parlemen modern sendiri berfokus pada tiga aspek utama, yakni meningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, memanfaatkan teknologi informasi digital, dan optimalisasi performa fungsi representasi, sehingga akan mendekatkan diri dan lebih terbuka kepada masyarakat umum.

Untuk mewujudkan parlemen modern tersebut, DPR RI lewat Tim Reformasi tengah membangun tonggak-tonggak lanjutan dari ikhtiar tersebut, setahap demi setahap. Keinginan DPR ini adalah betul-betul memiliki satu tradisi legislatif atau lembaga perwakilan yang baku. Bahkan, Tim Implementasi Reformasi DPR RI di bawah pimpinan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sudah melakukan kunjungan ke sejumlah negara yang memiliki konsep parlemen modern, antara lain Parlemen Amerika Serikat The House of Representative Parlemen Australia di Canberra, terakhir kunjungan ke Assemblee Nationale (Parlemen) Paris di Perancis, yang juga dalam rangka merampungkan kerja konseptual tentang bagaimana kelembagaan parlemen yang ideal ke depan.

Selama di Paris, Tim Implementasi Reformasi DPR juga ingin menyelesaikan dokumen-dokumen yang menjadi bahan bagi legislasi kelembagaan DPR ke depan, baik Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan di bawahnya. Delegasi Tim Implementasi Reformasi DPR selama di Peranci, juga berdiskusi dengan KPK-nya Perancis, untuk mengidentifikasi bagaimana caranya supaya parlemen tidak dikait-kaitkan dengan isu korupsi.

Dalam kunjungan ke Parlemen Perancis, Delegasi Tim Implementasi Reformasi DPR membawa dua agenda. Pertama, melakukan pertemuan dengan Agence Francaise Anticorruption (AFA, Badan Antikorupsi Perancis) yang dipimpin Direktur Charles Duchaine. Pada 2016, AFA menghentikan represi/ penindakan korupsi dan kini berfokus pada pencegahan. Kedua, pertemuan dengan Dubes RI untuk Perancis Letjen TNI (Purn) Hotmangaradja MP Pandjaitan di Kedubes RI di Paris. Selain itu, delegasi juga melakukan pertemuan dengan Parlemen Perancis dan diterima oleh Raphel Gerard selaku Ketua Fraksi Partai Berkuasa yaitu En' Marche di Parlemen Perancis, dengan tema Modernisasi Parlemen.

Saat menyaksikan Parlemen Prancis bersidang, Fahri selaku Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR



RI berharap kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Prancis dapat ditingkatkan, termasuk sistem pendukung kepada Anggota Parlemen.

Delegasi, Tim Implementasi Reformasi DPR RI itu, mengaku kaget melihat Rapat Paripurna Parlemen Prancis yang gaduh. Karena dia mengira semakin *advance* demokrasinya, DPR-nya semakin sepi dari kegaduhan. "Ternyata justru, semakin *advance* demokrasinya, DPR ini semakin ribut," kata Fahri yang lantas menceritakan pengalamannya saat memimpin sidang DPR, di mana salah satu anggotanya hampir memukul pimpinan sidang. "Tetapi, itu dulu. Sekarang, setelah era digital tidak ada lagi peristiwa tersebut karena orang dibatasi bicara secara otomatis melalui mikrofon. Itulah di antara yang akan kami perbaiki ke depan, dan mudah-mudahan kami bisa kerja sama terus dengan Parlemen Perancis ini," sebut Fahri.

DPR RI memang menetapkan transparansi sebagai salah satu indikator parlemen modern dalam Rencana Strategis DPR RI 2015 – 2019. Indikator lainnya adalah, peningkatan representasi, dan penggunaan teknologi informasi. Banyak inisiatif untuk diimplementasikan dalam rangka reformasi parlemen di Indonesia. Muaranya mencakup tiga aspek, yakni: penguatan sistem kelembagaan dewan, penguatan sistem pendukung dewan, dan kemandirian DPR RI.

Selain itu, sebuah Alun-Alun Demokrasi di area Kompleks Parlemen Senayan, seperti yang ada di kompleks Perancis, juga pentingnya. Sehingga dengan begitu, para anggota Dewan sehari-harinya bisa mengetahui apakah ada tuntutan juga aspirasi yang disampaikan masyarakat. "Adanya aspirasi dari masyarakat itu, artinya buat parlemen ada masalah yang harus diomongin. Tapi kalau nggak ada orang demo, semua sepi-sepi saja. Artinya, semua masalah sudah selesai," kata Fahri.

Delegasi DPR RI terdiri dari Sodiq Mujahid (F-Gerindra), Ahmad Riski Sadig (F-PAN), Mafirion (F-PKB), Jazuli Juwaini (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), Muchtar Luthfi (F-Nasdem), Lalu Gede Mujahidin (F-Hanura), serta Badan Keahlian DPR dan tenaga ahli.

Hingga saat ini, novasi yang sudah dilakukan oleh DPR RI periode sekarang adalah diluncurkannya aplikasi DPR NOW!, pada Agustus 2018 lalu. Bahkan, sejak aplikasi ini diluncurkan, jumlah pengunduh aplikasi melonjak dari 517 menjadi 7.670 hingga pertengahan Desember 2018.

Terobosan baru lain yang akan dilakukan dengan menerapkan e-voting dalam pengambilan keputusan di DPR RI. Termasuk hadirnya Pusat Penyiaran dan Informasi Parlemen (PPIP), sebagai perwujudan dari parlemen modern dan terbuka tersebut. □*□